

# **FLYPAPER EFFECT DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI INDONESIA**

**Henni Indriyani<sup>1</sup>, Citra Indah Merina<sup>2</sup>, Tiari Juniarti Purba<sup>3</sup>**

Universitas Bina Darma

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 3 Palembang

Sur-el: henni.indriyani@binadarma.ac.id<sup>1</sup>, citraindah@binadarma.ac.id<sup>2</sup>,  
tiarijuniartipurba@gmail.com<sup>3</sup>

---

**Abstract:** *This study aimed to determine the effect of the General Allocation Fund (DAU) and Region Own Source Revenue (PAD) to the Region Expenditure at the provincial governments in Indonesia so it can be proved whether there were flypaper effect or not. The variables used in this study is the General Allocation Fund and Region Own Source as the independent variable and Region Expenditure as the dependent variable. The sample selection method is purposive sampling with total sample 32 provinces. The data that used in this study is secondary data that is the revenues and expenditures budget in 2013. The analysis model is a linear regression. The results of this study indicate that the Region Own Source have more significant influence to region expenditure than the General Allocation Fund. This shows that the local government level in the Indonesian province more relied on revenue rather than aid from the central government.*

**Keywords:** *general allocation fund, region own source, region expenditure, flypaper effect*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia sehingga dapat dibuktikan apakah terjadi flypaper effect. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen dan belanja daerah sebagai variabel dependen. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 32 daerah provinsi di Indonesia. Data penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2013. Model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang lebih signifikan terhadap belanja daerah daripada Dana Alokasi Umum sehingga tidak terjadi flypaper effect. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia lebih bertumpu pada PAD daripada bantuan dari pemerintah pusat.*

**Kata kunci :** *dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, belanja daerah, flypaper effect.*

---

## **1. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Penyelenggaraan pemerintahan negara Republik

Indonesia dibagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kebijakan Indonesia tentang otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Otonomi daerah di satu sisi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, namun di sisi lain memberikan implikasi tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.

Salah satu fenomena yang paling mencolok dari otonomi daerah di Indonesia adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini sangat terlihat jelas dari aspek keuangan. Alokasi transfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kurang memperhatikan kemampuan tiap-tiap daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber

pendanaannya. Akibat yang ditimbulkan ialah pemerintah daerah akan selalu menuntut transfer yang besar dari pemerintah pusat, bukannya memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya. Ketergantungan ini menimbulkan rendahnya peran pemerintah daerah itu sendiri dalam mendanai belanja daerah. Di saat alokasi DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan berusaha agar pada periode berikutnya DAU diperoleh tetap porsi nominalnya. Menurut Ndadari dan Adi (2008), proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk melihat apakah terjadi indikasi inefisiensi pada dana transfer tersebut, dapat dilihat dari respon pengeluaran pemerintah yang lebih dikenal dengan teori *flypaper effect*. Menurut Oates dalam Kuncoro (2007), respon di sini merupakan suatu tanggapan langsung dari pemerintah daerah dalam menyikapi transfer dana dalam bentuk dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diwujudkan pada anggaran belanja daerah. Ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut dengan *flypaper effect*.

Afrizawati (2012) pernah melakukan pengujian adanya *flypaper effect* pada belanja pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa *flypaper effect* terjadi pada DAU terhadap belanja daerah. Namun, hasil penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah Indonesia, karena pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di luar

Sumatera Selatan. Menanggapi hal tersebut, Mentayani dkk (2012) melakukan penelitian yang sama pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Hasil yang diperoleh berbeda dengan penelitian Afrizawati (2012) sebelumnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh lebih besar daripada DAU terhadap belanja daerah, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi *flypaper effect* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Melihat beberapa temuan pada penelitian sebelumnya yang terfokus di daerah kabupaten/kota, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian *flypaper effect* untuk keseluruhan provinsi di Indonesia. Secara mendalam akan dilihat pula pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah di Indonesia. Adapun hipotesis yang ingin diuji dalam penelitian ini yaitu:

H<sub>1</sub> : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

H<sub>2</sub> : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

H<sub>3</sub> : Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah DAU dan PAD memiliki pengaruh terhadap belanja daerah provinsi di Indonesia dan mengetahui apakah *flypaper effect* terjadi pada belanja daerah pemerintah daerah

tingkat provinsi di Indonesia. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dari APBD serta undang-undang dan peraturan pemerintah yang menyertainya.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

### 2.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian menitikberatkan pada pembahasan *flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia untuk periode tahun 2013.

### 2.2. Populasi dan Sampel

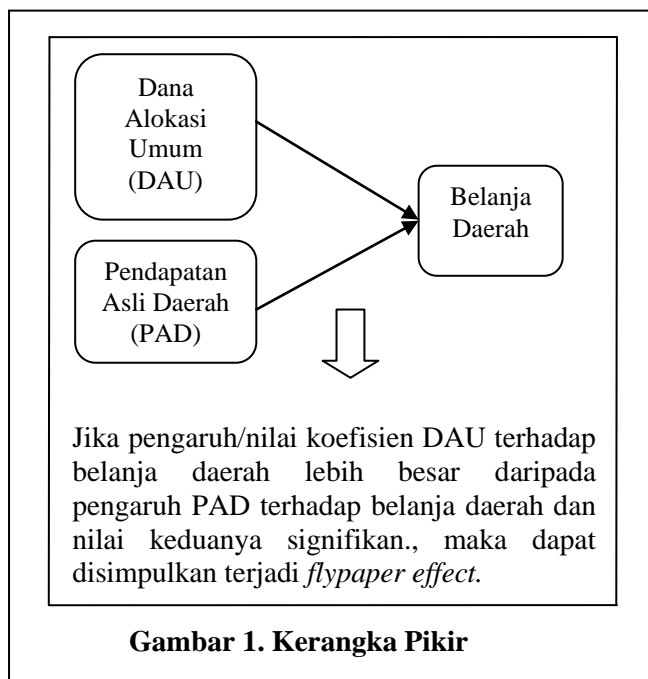
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia, yaitu sebanyak 34 daerah provinsi.

Dalam menentukan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Provinsi yang dapat dijadikan sampel adalah provinsi yang telah membuat dan mempublikasikan laporan realisasi anggaran periode 2013 di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yaitu sebanyak 32 provinsi. Adapun ke-34 provinsi tersebut adalah Provinsi Aceh, Bali,

Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

### 2.3. Kerangka Penelitian

Berikut adalah kerangka pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini:



### 2.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah suatu teknik analisis untuk mengukur kekuatan hubungan antara

variabel dependen dengan variabel independen. Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu regresi linear berganda. Hal ini menunjukkan hubungan (korelasi) antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lainnya. Karena terdapat lebih dari dua variabel, maka hubungan linier dapat dinyatakan dalam persamaan regresi linier berganda.

### 2.4. Model Pengujian Hipotesis

Regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh perubahan dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{DAU} + \beta_2 \text{PAD} + e$$

dimana:

- Y = Belanja Daerah
- $\alpha$  = Koefisien konstanta
- $\beta_{1-2}$  = Koefisien regresi variabel independen
- DAU = Dana Alokasi Umum
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- e = *Error term*

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. *Flypaper effect* dinyatakan terjadi jika DAU memberikan efek yang lebih besar terhadap belanja daerah jika dibandingkan efek PAD terhadap belanja daerah, dimana DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah, atau PAD tidak berpengaruh secara

signifikan. Jika keadaan tersebut terpenuhi, maka telah terjadi *flypaper effect*.

## 2.5. Definisi Operasional Variabel

### 2.5.1. Variabel Independen

#### 2.5.1.1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN untuk menyokong kemampuan keuangan daerah dalam mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Perhitungan DAU menurut ketentuan yang berlaku adalah: (a) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN, (b) Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% dan 90%, dan (c) DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.

Menurut Solihin dalam Saputri (2014), DAU merupakan dana perimbangan pemerintah pusat yang memiliki persentase paling besar di antara jumlah dana perimbangan lainnya yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam APBN. DAU diberikan pemerintah untuk mengatasi masalah *horizontal imbalance*, yaitu untuk menjamin keseimbangan sumber-sumber alokasi antar unit pemerintah pada tingkat pemerintah yang sama.

#### 2.5.1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah yang terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, serta (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

#### 2.5.1.3. Flypaper Effect

Menurut Sudrajat dalam Tampubolon (2011), *flypaper effect* merupakan suatu kondisi pada saat pemerintah daerah merespon berbeda (lebih boros) dalam menentukan belanja daerah dengan mendasarkan pada transfer dari pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah menunggu alokasi DAU yang diperolehnya sebelum menentukan berapa besar belanja yang akan dihabiskannya, sehingga belanja periode mendatang cenderung lebih besar jumlahnya.

Venter dalam Saputri (2014) menyatakan bahwa *flypaper effect* terjadi apabila: (1) Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh/respon PAD terhadap belanja daerah tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi *flypaper effect* dan (2) Pengaruh/nilai koefisien DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah dan nilai keduanya signifikan.

### 2.5.2. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah total belanja daerah. Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah dalam suatu periode anggaran. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 3. HASIL

### 3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk memberi gambaran umum mengenai nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari data yang digunakan dalam penelitian. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah belanja daerah.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni melalui metode *purposive sampling*, diperoleh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah 32 pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia yang memenuhi unit kriteria dengan 32 unit analisis.

Berikut ini data statistik secara umum dari variabel penelitian yang diperoleh dari sampel 32 pemerintah daerah tingkat provinsi untuk tahun 2013:

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

| Descriptive Statistics |    |               |                 |                  |                |
|------------------------|----|---------------|-----------------|------------------|----------------|
|                        | N  | Mini<br>mum   | Maxim<br>um     | Mean             | Std. Deviation |
| DAU                    | 32 | 5263<br>8.00  | 156978<br>0.00  | 829748.2<br>813  | 329481.93252   |
| PAD                    | 32 | 1159<br>05.00 | 220408<br>00.00 | 2690036.<br>1875 | 4345086.70830  |
| BD                     | 32 | 8681<br>33.00 | 315587<br>00.00 | 4787369.<br>4063 | 5818885.01958  |
| Valid N<br>(listwise)  | 32 |               |                 |                  |                |

Sumber: Data diolah penulis.

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki sampel (N) sebanyak 32. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah DAU paling rendah sebesar Rp52.638.000.000 terdapat di Kalimantan Timur, sedangkan DAU tertinggi sebesar Rp1.569.780.000.000 terdapat di Papua. Rata-rata DAU adalah sebesar Rp829.748.281.300.000. DAU memiliki standar deviasi Rp329.481.932.520.000 yang menunjukkan variasi penyebaran data pada variabel tersebut.
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki sampel (N) sebanyak 32. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah PAD paling rendah sebesar Rp115.905.000.000 terdapat di Maluku Utara, sedangkan PAD tertinggi sebesar Rp22.040.800.000.000 terdapat di DKI Jakarta. Rata-rata PAD adalah sebesar Rp2.690.036.187.500.000. PAD memiliki standar deviasi Rp4.345.086.708.300.000 yang menunjukkan variasi penyebaran data pada variabel tersebut.
3. Variabel belanja daerah memiliki sampel (N) sebanyak 32. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah belanja daerah paling rendah sebesar Rp868.133.000.000 terdapat di Sulawesi Barat, sedangkan belanja daerah tertinggi sebesar Rp31.558.700.000.000 terdapat di DKI Jakarta. Rata-rata

belanja daerah adalah sebesar Rp4.787.369.406.300.000. belanja daerah memiliki standar deviasi Rp5.818.885.019.580.000 yang menunjukkan variasi penyebaran data pada variabel tersebut.

### **3.2. Uji Asumsi Klasik**

Mempertimbangkan bahwa dalam model regresi yang ingin dicapai adalah BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dan adakalanya sering dijumpai dalam model regresi linear berganda berbagai masalah terutama pelanggaran terhadap asumsi klasik, maka dalam penelitian ini dilakukan pengujian asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, dimana hasil pengujian menyatakan bahwa semua telah memenuhi asumsi klasik.

#### **3.2.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk melihat tingkat kenormalan data yang digunakan, apakah data berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang normal. Tingkat kenormalan data sangat penting, karena dengan data yang terdistribusi normal, maka dianggap dapat mewakili populasi. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji normal P Plot. Syarat uji normalitas dapat dikatakan normal jika penyebaran titik mendekati garis diagonal.

Hasil pengolahan data dengan menggunakan pendekatan *one sample* KS

menunjukkan bahwa secara keseluruhan nilai-nilai observasi data telah terdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya.

### 3.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas yaitu dengan melihat *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, apabila nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,1, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa semua variabel bebas memiliki nilai VIF yang rendah atau kurang dari 10 dan toleransi lebih dari 0,1. Dengan demikian dalam model ini tidak ada masalah multikolinieritas.

### 3.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan heteroskedastisitas atau ketidaksamaan model varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model residual yang baik jika tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas. Syarat ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot. Jika penyebaran titik tidak membentuk pola atau acak maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Dari hasil pengujian dapat dijelaskan bahwa untuk variabel DAU nilai probabilitas (Sig.) lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  ( $0,55 > 0,05$ ) dan

variabel PAD nilai probabilitas (Sig.) lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  ( $0,237 > 0,05$ ). Artinya model regresi linear berganda bebas dari gejala heteroskedastisitas.

## 3.3. Pengujian Statistik Analisis Regresi

### 3.3.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Uji Statistik F**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| F-Statistik        | 279,8931 |
| Prob (F-Statistik) | 0.000000 |

Sumber: Data diolah penulis.

Berdasarkan uji di atas dapat diketahui bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, karena nilai probabilitas (F-statistik) adalah 0,0000 ( $<$ )  $\alpha=5\%$  atau 0,05.

### 3.3.2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t dilihat dari signifikansi nilai t-hitung. Hasil uji diperlihatkan pada tabel berikut:



**Tabel 3**  
**Uji Statistik t**

| Varia-<br>Ble | Coefi-<br>cient | Std.<br>Error | t-<br>Stat | Prob.  |
|---------------|-----------------|---------------|------------|--------|
| DAU           | 1,512           | 0,532         | 2,840      | 0,0052 |
| PAD           | 0,748           | 0,107         | 6,981      | 0,0000 |
| C             | -28124,6        | 240440,2      | -0,116     | 0,9071 |

Sumber: Data diolah penulis.

Berdasarkan pada hasil uji t, maka variabel yang signifikan pada taraf keyakinan 95% ( $\alpha=5\%$ ) adalah DAU dan PAD. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu belanja daerah.

Berdasarkan hasil regresi linear berganda diatas dapat dibentuk model persamaan regresi sebagai berikut:

$$BD = -28124,6 + 1,51 \text{ DAU} + 0,75 \text{ PAD} + e$$

Analisis atas hasil estimasi dari model di atas adalah sebagai berikut:

### 3.3.2.1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

Hasil regresi menunjukkan hubungan DAU terhadap belanja daerah adalah positif dan signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa jika DAU meningkat, maka belanja daerah juga meningkat. Apabila DAU mengalami peningkatan sebesar 1 juta rupiah, maka nilai belanja daerah akan bertambah sebesar 1,51 juta rupiah. Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan, diperoleh bahwa variabel DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum

(DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah tidak dapat diterima. Hal ini telah sesuai dengan tujuan awal DAU yaitu untuk pemerataan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah, sehingga ketergantungan daerah pada transfer DAU dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah perlahan-lahan dapat dikurangi dan pada akhirnya *flypaper effect* dapat dihindari.

Hal ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harianto dan Adi dalam Akbar (2012) dimana mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadikan lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer DAU semakin tinggi. Hasil ini juga tidak mendukung temuan Prakosa (2004) yang menemukan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Maimunah (2006) yang membuktikan pengaruh DAU terhadap belanja daerah dimana besarnya proporsi DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

### 3.3.2.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Hasil regresi menunjukkan pengaruh PAD terhadap belanja daerah adalah positif dan signifikan secara statistik. Besarnya hubungan itu adalah sebesar 0,75, artinya adalah jika PAD mengalami kenaikan 1 juta rupiah maka belanja daerah akan meningkat sebesar 0,75 juta rupiah.

Hasil uji parsial yang telah dilakukan menyatakan bahwa variabel PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dapat diterima. Hal ini disebabkan karena PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah sehingga jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Abdullah dan Halim dalam Akbar (2012) yang menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2004) juga sejalan dengan penelitian ini yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Ini berarti semakin besar PAD, maka belanja daerah pada pemerintah daerah tingkat Provinsi di Indonesia semakin tinggi.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon (2011) menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah menjadikan PAD sebagai sumber pembiayaan dalam membiayai belanja daerah.

### **3.3.2.13. Fenomena *Flypaper Effect***

Hasil regresi membuktikan bahwa pengaruh DAU lebih besar dibandingkan dengan pengaruh PAD. Hal ini berarti tidak ditemukan fenomena *flypaper effect* dimana kebijakan

belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD, atau respon belanja daerah terhadap penerimaan DAU berbeda dengan penerimaan PAD. Fenomena *flypaper effect* merupakan suatu kondisi dimana pemerintah daerah bertumpu pada bantuan dari pemerintah pusat (DAU) untuk menutupi kekurangan kemampuan keuangan daerah dalam menutupi biaya-biaya yang timbul demi berjalannya roda pemerintahan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip otonomi daerah, dimana pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

Selain itu *flypaper effect* juga dapat diartikan bahwa pemerintah daerah yang merespon berbeda dalam menentukan belanja daerah dengan mendasarkan pada transfer (DAU) dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menunggu alokasi DAU yang diperolehnya sebelum menentukan berapa besar belanja yang akan dihabiskannya, sehingga belanja periode mendatang cenderung lebih besar jumlahnya.

Kondisi *flypaper effect* jelas merupakan suatu hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena kondisi tersebut menunjukkan bahwa daerah masih bergantung terhadap pemerintah pusat. Padahal cita-cita utama otonomi daerah adalah menciptakan kemandirian daerah tanpa bergantung kepada pemerintah pusat. Jika hal ini terus dibiarkan maka otonomi daerah kemungkinan akan mengalami kegagalan.

Dari hasil pengujian yang dilakukan pada 32 pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia untuk tahun 2013 ini ditemukan fakta bahwa PAD memiliki pengaruh yang lebih

dominan terhadap belanja daerah daripada pengaruh DAU terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia. Pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia telah mandiri dari segi keuangan karena telah mampu bertumpu pada kemampuan keuangan daerah itu sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa (1) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis pertama yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dengan koefisien 0,75. Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis kedua yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, dan (3) Tidak terdapat fenomena *flypaper effect* dalam kinerja anggaran pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia yang ditunjukkan oleh lebih besarnya pengaruh PAD dibandingkan DAU terhadap belanja daerah.

Beberapa saran yang menjadi masukan dalam penelitian ini antara lain perlunya optimalisasi penerimaan PAD dikarenakan rendahnya kontribusi PAD terhadap belanja daerah yang disebabkan oleh rendahnya

penerimaan daerah dari PAD. Optimalisasi penerimaan PAD dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak daerah mengingat pajak daerah merupakan sumber PAD yang paling besar. Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan disebabkan karena rendahnya PAD. Belanja daerah diharapkan lebih diarahkan pada belanja sektor publik agar penerimaan daerah dari penggunaan sektor publik dapat menambah kas PAD, sehingga ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dapat diminimalisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrizawati. 2012. *Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan*. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius). Volume 2, Nomor 1. Januari, Hal. 3.
- Akbar, Taufik. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2011)*. Universitas Pasundan.
- Kuncoro, Haryo. 2007. *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X, 26-28 Juli 2007, Makassar.
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect Pada DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*.

- Simposium Nasional Akuntansi IX, 23-26 Agustus 2006. Padang.
- Mentayani, Ida., Hayati, Nurul., dan Rusmanto. 2012. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Spread. Volume 2 Nomor 2, Hal. 4
- Ndadari, Laras Wulan dan Adi, Priyo Hari. 2008. *Prilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat*. The 2<sup>nd</sup> National Conference UKWMS, 6 September 2008. Surabaya.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum DAU dan Pendapatan Asli Daerah PAD terhadap prediksi Belanja Daerah Studi Empiris di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY*. JAAI, Volume 8, Nomor 2, Hal. 26.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Akuntansi Aset, Akuntansi Selain Kas*.
- \_\_\_\_\_. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Akuntansi Aset, Akuntansi Selain Kas*.
- \_\_\_\_\_. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Saputri, Marissa Ayu. 2014. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2012*. Universitas Diponegoro.
- Tampubolon, Leonard P. 2011. *Fenomena Flypaper Effect pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau*. Universitas Sumatera Utara.